PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH
Alamat : Jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi
Telp. (0283) 491665 – 491668 – 491764 - 491765 Fax. (0283) 491670
Kodde Pos Slawi 52417

PENGUMUMAN

NOMOR : 800.1.2.2/26/A. 2268 /2024

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Bupati Tegal Nomor 800.1.2.1/668 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Tegal membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar ***kecuali*** untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan:
   a. Dokter dan Dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
   b. Dokter Pendidik Klinis; dan
   c. Dosen, Peneliti, dan Perekayasa dengan kualifikasi pendidikan Strata Tiga (S-3/Doktor),

   berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar.
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb Instansi masing-masing. Teknis persetujuan bisa dikonsultasikan secara langsung ke BKD/BKPSDM/BKPPD/Biro Kepegawaian Instansi masing-masing.

7. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
8. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
9. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan spesifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
12. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
13. Tidak pernah mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya.
14. Mengajukan surat lamaran menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Bupati Tegal.
15. Bersedia mengabdi kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS.
16. Mendaftar pada 1 (satu) instansi pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan.
17. Pelamar bersedia dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila data yang disampaikan dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 terbukti tidak benar dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

II. PERSYARATAN KHUSUS

1. Formasi umum:
   a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
   b. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan (Pusdiknakes)/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
   c. Lulusan perguruan tinggi luar negeri dan memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
   d. Pelamar jabatan tenaga kesehatan tidak buta warna.
   e. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR yang dikeluarkan oleh:
      1. Konsili Kedokteran Indonesia (KKI)/Konsili Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI) untuk tenaga Dokter/Dokter Spesialis/Dokter Gigi/Dokter Gigi Spesialis.
      2. Komite Farmasi Nasional (KFN) untuk tenaga Apoteker.
      3. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya.

      STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

STR *Internship*, STR Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS), dan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR **bukan bagian dari persyaratan ini dan dinyatakan tidak berlaku.**

f. Penyandang disabilitas dapat melamar pada formasi umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melamar pada jabatan yang dibuka bagi penyandang disabilitas dan memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan.
2. Wajib menyatakan bahwa pelamar merupakan penyandang disabilitas, yang dibuktikan dengan:
   a) Dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
   b) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

Bagi pelamar penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum berlaku nilai ambang batas kelulusan untuk jenis formasi umum.

2. Formasi Khusus Penyandang Disabilitas:

a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.

b. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri dan memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

c. Lulusan perguruan tinggi luar negeri dan memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

d. Pelamar wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.

e. Pelamar wajib menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar.

f. Pelamar jabatan tenaga kesehatan bebas buta warna.

g. Pelamar pada formasi jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) wajib melampirkan STR yang dikeluarkan oleh:

1. KKI/KKGI untuk tenaga dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis.
2. KFN untuk tenaga apoteker.
3. MTKI atau lembaga/instansi yang berwenang untuk tenaga kesehatan lainnya.

STR yang dilampirkan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

STR *Internship*, STR WKDS, dan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR bukan bagian dari persyaratan ini dan dinyatakan tidak berlaku.

III. FORMASI DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

Formasi dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Lampiran I pengumuman ini.

Para calon pelamar dimohon untuk memperhatikan dan menjadikan formasi dalam lampiran pengumuman sebagai acuan dalam melamar formasi dan jabatan CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. **Kualifikasi/jenis/nomenklatur pendidikan pelamar yang tidak sesuai dengan formasi yang tercantum dalam lampiran pengumuman tidak akan diterima.**

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal tahun 2024 dilakukan secara *online* melalui portal *https://sscasn.bkn.go.id* mulai tanggal **20 Agustus 2024 s.d. 6 September 2024**. Pelamar membuat akun menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP)/surat keterangan perekaman e-KTP dan NIK kepala keluarga pada Kartu Keluarga (KK) atau nomor KK pelamar.
2. Pelamar *log in* menggunakan NIK sebagai *username* dan *password* yang sudah didaftarkan pada saat membuat akun di SSCASN.
3. Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi, formasi dan jabatan sesuai kualifikasi pendidikan serta melengkapi data pendidikan.
4. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
5. Peserta melakukan cek resume pendaftaran dengan cara memeriksa semua hasil kelengkapan biodata dan dokumen yang sudah diunggah.
6. Setelah selesai mendaftar pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran.

V. DOKUMEN PERSYARATAN PELAMAR

1. Formasi Umum

a. ***File scan*** surat lamaran asli yang ditujukan kepada **Bupati Tegal**, diketik dengan menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Format surat dapat dilihat pada Lampiran II pengumuman ini dan dapat diunduh pada portal *bkpsdm.tegalkab.go.id.* **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 500 kb**.

b. ***File scan*** e-KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. **Format *file* jpg dan ukuran *file* maksimal 500 kb**.

c. ***File scan*** ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 **selain** profesi **Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis.**

d. ***File scan*** ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi hilang atau rusak (S-1+Profesi) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter, Dokter Gigi.**

File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan spesialis asli atau pengganti ijazah pendidikan spesialis asli jika ijazah pendidikan spesialis asli hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter Spesialis**.

Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb.

e. ***File scan*** bukti akreditasi perguruan tinggi/akreditasi program studi pada saat kelulusan. Bukti akreditasi bisa berupa sertifikat akreditasi/surat keputusan akreditasi/cetakan tangkapan layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi program studi dari BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes. **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 500 kb**.

f. ***File scan*** transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 **selain** profesi **Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis.**

g. ***File scan*** transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (S-1+Profesi dijadikan satu file) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter, Dokter Gigi.**

File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak, transkrip nilai spesialis asli atau pengganti transkrip nilai spesialis asli jika transkrip nilai asli spesialis hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis dijadikan satu file) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan **Dokter Spesialis**.

Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb.

h. ***File scan*** surat pernyataan yang diketik computer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai format yang ditentukan. Format surat dapat dilihat pada Lampiran III pengumuman ini dan dapat diunduh pada portal *bkpsdm.tegalkab.go.id*. **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb**.

i. ***File scan*** pas photo berwarna dengan latar belakang merah. **Format *file* jpg dan ukuran *file* maksimal 300 kb**.

j. ***File scan*** surat keterangan asli yang menyatakan tidak buta warna dari dokter instansi pemerintah (rumah sakit pemerintah/puskesmas). Persyaratan ini ditujukan bagi pelamar formasi tenaga kesehatan. **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb**.

k. ***File scan*** STR asli yang masih berlaku dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam persyaratan nomor II.1.e. pengumuman ini. **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb**.

l. Untuk penyandang disabilitas yang melamar formasi umum persyaratan ditambah:

1) ***File scan*** surat pernyataan asli sebagai penyandang disabilitas dan ***file scan*** surat keterangan asli dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas (dijadikan satu file). **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb**.

2) ***Link*** **(tautan)** video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Pelamar **mengunggah video singkat di *youtube/googledrive/ dropbox/* penyimpanan lainnya**, lalu memasukan ***link*** **(tautan)** video tersebut di SSCASN. Ukuran video yang diunggah di *youtube/googledrive/dropbox/*penyimpanan lainnya **maksimal 20 mb.**

2. Formasi Khusus Disabilitas

a. ***File scan*** surat lamaran asli yang ditujukan kepada **Bupati Tegal**, diketik dengan menggunakan komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Format surat dapat dilihat pada Lampiran I pengumuman ini dan dapat diunduh pada portal *bkpsdm.tegalkab.go.id.* **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 500 kb**.

b. ***File scan*** e-KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. **Format *file* jpg dan ukuran *file* maksimal 500 kb**.

c. ***File scan*** ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 **selain** profesi **Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis.**

File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi hilang atau rusak (S-1+Profesi) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter, Dokter Gigi.**

File scan ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah pendidikan asli jika ijazah pendidikan asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan profesi asli atau pengganti ijazah pendidikan profesi asli jika ijazah pendidikan profesi asli hilang atau rusak, ijazah pendidikan spesialis asli atau pengganti ijazah pendidikan spesialis asli jika ijazah pendidikan spesialis asli hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter Spesialis**.

Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb.

d. ***File scan*** bukti akreditasi perguruan tinggi/akreditasi program studi pada saat kelulusan. Bukti akreditasi bisa berupa sertifikat akreditasi/surat keputusan akreditasi/cetakan tangkapan layar (*screen capture*) direktori hasil akreditasi program studi dari BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes. **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 500 kb**.

e. ***File scan*** transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan D-III/D-IV/S-1 **selain** profesi **Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis.**

File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak (S-1+S-2+Profesi dijadikan satu file) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan profesi **Dokter, Dokter Gigi.**

File scan transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli jika transkrip nilai asli hilang atau rusak, transkrip nilai profesi asli atau pengganti transkrip nilai profesi asli jika transkrip nilai profesi asli hilang atau rusak, transkrip nilai spesialis asli atau pengganti transkrip nilai spesialis asli jika transkrip nilai asli spesialis hilang atau rusak (S-1+Profesi+Spesialis dijadikan satu file) **khusus** bagi pelamar dengan kualifikasi pendidikan **Dokter Spesialis.**

Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb.

f. ***File scan*** surat pernyataan yang diketik komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai format yang ditentukan. Format surat dapat dilihat pada Lampiran III pengumuman ini dan dapat diunduh pada portal *bkpsdm.tegalkab.go.id*. **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb.**

g. ***File scan*** pas photo berwarna dengan latar belakang merah. **Format *file* jpg dan ukuran *file* maksimal 300 kb.**

h. ***File scan*** surat pernyataan asli sebagai penyandang disabilitas yang diketik komputer, ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai nominal Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai format yang ditentukan. Format surat dapat dilihat pada Lampiran IV pengumuman ini dan dapat diunduh pada portal *bkpsdm.tegalkab.go.id*. dan ***file scan*** surat keterangan asli dokter dari rumah sakit pemerintah yang menerangkan jenis dan tingkat disabilitas (dijadikan satu file). **Format *file* pdf dan ukuran *file* maksimal 1000 kb.**

i. ***Link* (tautan)** video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar. Pelamar **mengunggah video singkat di *youtube/googledrive/ dropbox/* penyimpanan lainnya**, lalu memasukan ***link* (tautan)** video tersebut di SSCASN. Ukuran video yang diunggah di *youtube/googledrive/dropbox/*penyimpanan lainnya **maksimal 20 mb.**

VI. SELEKSI DAN KELULUSAN

1. Seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) tahap:

   a. Seleksi Administrasi.

      Seleksi administrasi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara dokumen pelamar yang diunggah di SSCASN dengan persyaratan yang telah ditentukan.

   b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) BKN dengan bobot 40%. Materi SKD terdiri dari:

1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
   Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara dan bahasa negara.
   TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal dengan **nilai ambang batas 65 (enam puluh lima).**
2) Tes Intelegensi Umum (TIU).
   Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan kemampuan verbal (analogi, silogisme dan analitis), kemampuan numerik (berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif dan soal cerita) dan kemampuan figural (analogi, ketidaksamaan dan serial).
   TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal dengan **nilai ambang batas 80 (delapan puluh) untuk formasi umum dan nilai ambang batas 60 (enam puluh) untuk formasi khusus penyandang disabilitas.**
3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
   Bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme dan anti radikalisme.
   TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal dengan **nilai ambang batas 166 (seratus enam puluh enam).**

Bagi penyandang disabilitas yang melamar pada formasi umum, berlaku nilai ambang batas formasi umum.

c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) menggunakan sistem CAT BKN dengan bobot 60%. SKB diikuti oleh peserta yang lulus SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan Jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas.

2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan oleh Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 melalui media cetak, *website* Pemerintah Kabupaten Tegal: *www.tegalkab.go.id* dan *website* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tegal: *http://bkpsdm.tegalkab.go.id*.

3. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dan pengumuman hasil CPNS dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi diumumkan melalui SSCASN. Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

4. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Bupati Tegal, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikan dan/atau persyaratan lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Bupati Tegal akan mengumumkan pembatalan kelulusan terhadap pelamar yang bersangkutan.

VII. LAIN-LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.
2. Masyarakat diminta untuk tidak percaya atau menaruh harapan kepada pihak-pihak tertentu yang menjanjikan kelulusan peserta dalam seleksi pengadaan CPNS ini dengan imbalan uang atau imbalan bentuk lain.
3. Pemerintah Kabupaten Tegal tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk pungutan atau tawaran apapun dari oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024.
4. Pelamar yang memberikan data palsu akan dinyatakan gugur dan dikenai sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.
5. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

VIII. JADWAL PELAKSANAAN

NO.	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS TA 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD	17 s.d. 19 November 2024
15	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS	20 s.d. 22 November 2024
16	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
17	Penarikan Data Final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
18	Penjadwalan SKB CPNS	28 November s.d. 3 Desember 2024
19	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKB CPNS	4 s.d. 8 Desember 2024
20	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
21	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025

22	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
23	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
24	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
25	Pengumuman Seleksi Hasil Sanggah	13 s.d. 20 Januari 2025
26	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
27	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
28	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berminat untuk melamar sebagai CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Informasi terkait pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 dilayani melalui *Help Desk* CASN 2024 *offline* di kantor BKPSDM Kabupaten Tegal, *Call Center*: 0283-491116, akun *Instagram* BKPSDM Kabupaten Tegal: *@bkpsdmtegalkab*, *website* BKPSDM Kabupaten Tegal: *bkpsdm.tegalkab.go.id* dan *email* BKPSDM Kabupaten Tegal: *kabtegal.casn@gmail.com*.

Slawi, 19 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN
Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA TEGAL

AMIR MAKHMUD, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197301141998031003

Lampiran I
Pengumuman Sekretaris Daerah Kab. Tegal
Tentang Pengadaan CPNS Pemerintah Kab. Tegal TA 2024
Nomor : 800.1.2.2/26/A·2268 /2024
Tanggal : 19 Agustus 2024

KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2024

JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	FUNGSIONAL	SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1		1	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	FUNGSIONAL	SPESIALIS KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI	1		1	RSUD SURADADI | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	FUNGSIONAL	DOKTER SPESIALIS MATA	1		1	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	FUNGSIONAL	SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	1		1	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	FUNGSIONAL	SPESIALIS ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI	1		1	RSUD SURADADI | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	FUNGSIONAL	SPESIALIS PATOLOGI ANATOMIK	1		1	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK - BEDAH KEPALA DAN LEHER	FUNGSIONAL	DOKTER SPESIALIS TELINGA HIDUNG TENGGOROK / DOKTER SPESIALIS TELINGA, HIDUNG, TENGGOROKAN, KEPALA, LEHER	1		1	RSUD SURADADI | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER	1		1	RSUD SURADADI | BIDANG PELAYANAN MEDIS DAN KEPERAWATAN | SEKSI PELAYANAN MEDIS
9	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER	1		1	DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS MARGASARI
10	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER	1		1	DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS SLAWI
11	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER	1		1	DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS PANGKAH
12	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER	1		1	DINAS KESEHATAN | UPTD WISATA KESEHATAN JAMU
13	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER	1		1	DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS JATINEGARA
14	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER	1		1	DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS DANASARI
15	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER	4		4	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN MEDIS | DOKTER UMUM
16	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	PROFESI DOKTER GIGI	1		1	DINAS KESEHATAN | PUSKESMAS | PUSKESMAS KUPU
17	REFRAKSIONIS OPTISIEN TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REFRAKSI OPTISI / D-III OPTOMETRI	1		1	RSUD SURADADI | BIDANG PELAYANAN PENUNJANG | SEKSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
JUMLAH						20	

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN
Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2024

AMIR MAKHMUD, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197301141998031003

JABATAN TEKNIS

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	1		1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
2	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 PARIWISATA	2		2	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | BIDANG PARIWISATA
3	ANALIS AKUAKULTUR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 BUDIDAYA PERAIRAN	1		1	DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
4	ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN / S-1 PLANOLOGI / S-1 GEOGRAFI / S-1 MANAJEMEN BENCANA	1		1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN | SEKSI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
5	ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 GEOGRAFI	1		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN | SUB BIDANG PENCEGAHAN
6	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA DESA
7	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
8	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	2	1	3	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN
9	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA
10	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 HUKUM / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
11	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 HUKUM	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
12	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA
13	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
14	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA
15	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA
16	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
17	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM	2		2	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
18	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN SDA

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIOLOGI	1		1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | BIDANG OLAHRAGA
20	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PENATAAN DESA
21	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 HUKUM	1		1	INSPEKTORAT | SEKRETARIAT INSPEKTORAT
22	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
23	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
24	ANALIS KERJA SAMA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL	1		1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
25	ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN	1		1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | BIDANG KETAHANAN PANGAN
26	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI	2		2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG PERBENDAHARAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN | SUB BIDANG PERBENDAHARAAN
27	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI	1		1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ASET DAERAH
28	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI	1		1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN
29	ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI	1		1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | BIDANG SARANA DISTRIBUSI DAN PERIZINAN PERDAGANGAN
30	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1		1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
31	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA	1		1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI DAN PROMOSI
32	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 SEJARAH / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 TEKNOLOGI PANGAN	1		1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG KEARSIPAN
33	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	D-IV PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI / D-IV KEARSIPAN DIGITAL / D-IV MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1		1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG KEARSIPAN
34	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
35	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI / D-III KEARSIPAN	1		1	INSPEKTORAT | SEKRETARIAT INSPEKTORAT | SUB BAGIAN ADMINSTRASI UMUM DAN KEUANGAN
36	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
37	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI BUPATI DAN KEPEGAWAIAN
38	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	KECAMATAN DUKUHWARU | SEKSI PEMERINTAHAN DESA
39	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
40	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | BIDANG KEARSIPAN
41	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
42	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK | SUB BIDANG PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI
43	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
44	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
45	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	KECAMATAN SLAWI | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
46	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
47	ARSIPARIS TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEARSIPAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III SISTEM INFORMASI	1		1	KECAMATAN DUKUHWARU | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
48	ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 PSIKOLOGI	2		2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | UPTD UNIT PENILAIAN KOMPETENSI ASN
49	ASISTEN PELATIH OLAHRAGA TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III KEPELATIHAN OLAHRAGA	1		1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | BIDANG OLAHRAGA
50	ASISTEN STATISTISI TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III STATISTIKA BISNIS / D-III STATISTIKA TERAPAN	2		2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG DATA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
51	AUDITOR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL	2		2	INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
52	AUDITOR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL	2		2	INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
53	AUDITOR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL	2		2	INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI
54	AUDITOR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK SIPIL	1	1	2	INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
55	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1		1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
56	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
57	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1		1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
58	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	KECAMATAN PAGERBARANG | SEKRETARIAT KECAMATAN PAGERBARANG | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
59	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	KECAMATAN JATINEGARA | SEKRETARIAT KECAMATAN JATINEGARA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
60	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1		1	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | SUB BAGIAN KEUANGAN
61	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
62	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 HUKUM	1		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENGEMBANGAN DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH
63	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1		1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
64	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN	1		1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
65	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN PAGERBARANG | SEKRETARIAT KECAMATAN PAGERBARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
66	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI	1		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK | SUB BIDANG PENYELAMATAN, EVAKUASI DAN PENANGANAN PENGUNGSI
67	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | SUB BAGIAN KEUANGAN
68	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG KESATUAN BANGSA
69	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	KECAMATAN PANGKAH | SEKRETARIAT KECAMATAN PANGKAH | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
70	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | SUB BAGIAN KEUANGAN
71	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
72	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | SEKRETARIAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
73	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	KECAMATAN DUKUHWARU | SEKRETARIAT KECAMATAN DUKUHWARU | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
74	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI / D-IV AKUNTANSI PERPAJAKAN	2		2	BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENYULUHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMERIKSAAN PENDAPATAN DAERAH

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
75	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU POLITIK	1		1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
76	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN	1		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
77	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	KECAMATAN MARGASARI | SEKRETARIAT KECAMATAN MARGASARI | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
78	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1	1	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | SUB BAGIAN KEUANGAN
79	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
80	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN DAN TEKNIK SARANA | SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL
81	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	DINAS SOSIAL | SEKRETARIAT DINAS SOSIAL | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
82	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	KECAMATAN BOJONG | SEKRETARIAT KECAMATAN BOJONG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
83	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN	1		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
84	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI	1		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
85	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	KECAMATAN TALANG | SEKRETARIAT KECAMATAN TALANG | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
86	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN	1		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
87	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN TALANG | SEKRETARIAT KECAMATAN TALANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
88	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	KECAMATAN KEDUNGBANTENG | SEKRETARIAT KECAMATAN KEDUNGBANTENG | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
89	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | SUB BAGIAN KEUANGAN
90	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 AKUNTANSI	1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SUB BAGIAN KEUANGAN
91	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM	1		1	KECAMATAN DUKUHWARU | SEKRETARIAT KECAMATAN DUKUHWARU | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
92	FASILITATOR PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
93	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ARKEOLOGI	1		1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG KEBUDAYAAN
94	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN ADIWERNA | SEKSI PELAYANAN PUBLIK
95	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN SURADADI | SEKSI PELAYANAN PUBLIK
96	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	KECAMATAN LEBAKSIU | SEKSI PELAYANAN PUBLIK
97	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN KEDUNGBANTENG | SEKSI PELAYANAN PUBLIK
98	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN MARGASARI | SEKSI PEMERINTAHAN DESA
99	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN BALAPULANG | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
100	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN BALAPULANG | SEKSI PELAYANAN PUBLIK
101	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN SURADADI | SEKSI PEMERINTAHAN DESA
102	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN	1		1	KECAMATAN KRAMAT | SEKSI PELAYANAN PUBLIK

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
103	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN KEDUNGBANTENG | SEKSI PEMERINTAHAN DESA
104	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN BOJONG | SEKSI PELAYANAN PUBLIK
105	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN SLAWI | SEKSI PELAYANAN PUBLIK
106	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN ADIWERNA | SEKSI PEMERINTAHAN DESA
107	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN BOJONG | SEKSI PEMERINTAHAN DESA
108	PAMONG PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI	1		1	KECAMATAN DUKUHTURI | SEKSI PELAYANAN PUBLIK
109	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1		1	DINAS SOSIAL | BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KEPAHLAWANAN
110	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	D-IV PEKERJAAN SOSIAL / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL	1		1	DINAS SOSIAL | BIDANG PERLINDUNGAN, JAMINAN SOSIAL DAN KEBENCANAAN
111	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK GEODESI / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2		2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN BANGUNAN, LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
112	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	3		3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
113	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	PELAKSANA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1		1	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR PELAYANAN | BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN
114	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	PELAKSANA	S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA / D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	1		1	DINAS KESEHATAN | BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
115	PENATA KELOLA LAYANAN KESEHATAN	PELAKSANA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1		1	DINAS KESEHATAN | BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN
116	PENATA KELOLA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PELAKSANA	S-1 PSIKOLOGI	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
117	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1		1	KECAMATAN PANGKAH | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
118	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN ADIWERNA | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
119	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN SURADADI | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
120	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1		1	KECAMATAN PAGERBARANG | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
121	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN DUKUHTURI | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
122	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN MARGASARI | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
123	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN BALAPULANG | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
124	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN WARUREJA | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
125	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN TARUB | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
126	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN KRAMAT | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
127	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN LEBAKSIU | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
128	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1		1	KECAMATAN BOJONG | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
129	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
130	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL	2		2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
131	PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2		2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN BANGUNAN, LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
132	PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK SIPIL / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 PLANOLOGI / D-IV PLANOLOGI	2		2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
133	PENATA KEPROTOKOLAN	PELAKSANA	S-1 ILMU KOMUNIKASI	3		3	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL
134	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III ARSITEKTUR / D-III TEKNIK SIPIL	1		1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH I | SUB BAGIAN TU UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH I
135	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III TEKNIK SIPIL / D-III PLANOLOGI / D-III PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1		1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN PERTANAHAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
136	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III ARSITEKTUR / D-III TEKNIK SIPIL	1		1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH II | SUB BAGIAN TU UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH II
137	PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III ARSITEKTUR / D-III TEKNIK SIPIL	1		1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH III | SUB BAGIAN TU UPTD PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN WILAYAH III
138	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1		1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ASET DAERAH | SUB BIDANG PEMINDAHTANGANAN DAN PENGAMANAN ASET
139	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III AKUNTANSI	1		1	DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN | SUB BAGIAN KEUANGAN
140	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III MANAJEMEN / D-III AKUNTANSI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER	1		1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ASET DAERAH
141	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III AKUNTANSI	1		1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN | SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR DAN UNSUR PENDUKUNG
142	PENATA LAKSANA BARANG TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III DESAIN GRAFIS / D-III DESAIN PRODUK	1		1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | BIDANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
143	PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III TEKNIK SIPIL / D-III ARSITEKTUR	3		3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG JALAN DAN JEMBATAN
144	PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK LINGKUNGAN	2		2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN BANGUNAN, LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
145	PENATA PERIZINAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ILMU POLITIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2		2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
146	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2		2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG PENATAAN BANGUNAN, LINGKUNGAN DAN TATA RUANG
147	PENELITI AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-2 EKONOMI / S-2 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
148	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 PSIKOLOGI / S-1 EKONOMI	1		1	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS, PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN KETRANSMIGRASIAN
149	PENGAWAS KOPERASI AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI	1		1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI
150	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1		1	INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN REFORMASI BIROKRASI
151	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1		1	INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN KHUSUS
152	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1		1	INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
153	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM	1		1	INSPEKTORAT | INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PENGAWASAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
154	PENGAWAS TRANSPORTASI DARAT	PELAKSANA	D-IV TRANSPORTASI DARAT / D-IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT	2		2	DINAS PERHUBUNGAN | BIDANG ANGKUTAN DAN TEKNIK SARANA | SEKSI ANGKUTAN DAN TERMINAL
155	PENGELOLA LAYANAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	PELAKSANA	D-III PERIKANAN	1		1	DINAS PERIKANAN | BIDANG PERIKANAN TANGKAP
156	PENGELOLA LAYANAN KESEHATAN	PELAKSANA	D-III TEKNOLOGI ELEKTROMEDIS	1		1	DINAS KESEHATAN | BIDANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
157	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK PENGAIRAN / S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 ARSITEKTUR / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	2		2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | BIDANG SUMBER DAYA AIR
158	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN	1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
159	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM	1		1	KECAMATAN KEDUNGBANTENG | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
160	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM	1		1	KECAMATAN TALANG | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
161	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN WARUREJA | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
162	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN SURADADI | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
163	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM	1		1	KECAMATAN TARUB | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
164	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU POLITIK / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM	1		1	KECAMATAN PANGKAH | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
165	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN BALAPULANG | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
166	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	KECAMATAN KRAMAT | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
167	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN ADIWERNA | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
168	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
169	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM	1		1	KECAMATAN JATINEGARA | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
170	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN LEBAKSIU | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
171	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN DUKUHWARU | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
172	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN BUMIJAWA | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
173	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU POLITIK	1		1	KECAMATAN BOJONG | SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
174	PENILAI PEMERINTAH AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK SIPIL	1		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENDATAAN DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH
175	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KIMIA	1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
176	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU LINGKUNGAN	1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP | BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP
177	PENYULUH PERTANIAN TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III BUDIDAYA PERTANIAN / D-III PENYULUHAN PERTANIAN / D-III TEKNIK PERTANIAN	1		1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | BIDANG PENYULUHAN PERTANIAN
178	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 HUKUM	1		1	SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
179	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 HUKUM	3		3	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN HUKUM
180	PEREKAYASA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-2 MANAJEMEN REKAYASA / S-2 REKAYASA INDUSTRI DAN MANAJEMEN / S-2 REKAYASA INDUSTRI PERTANIAN / S-2 REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN / S-2 REKAYASA LINGKUNGAN / S-2 REKAYASA PERTANIAN / S-2 REKAYASA SISTEM KOMPUTER / S-2 REKAYASA SUMBER DAYA AIR / S-2 SISTEM INFORMASI / S-2 TEKNOLOGI INFORMASI	2		2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
181	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 MANAJEMEN	1		1	INSPEKTORAT | SEKRETARIAT INSPEKTORAT
182	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI	2		2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
183	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
184	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
185	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN	1		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
186	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	D-IV TRANSPORTASI DARAT	1		1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
187	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1		1	DINAS KESEHATAN | SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN
188	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 AKUNTANSI	1		1	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN KEUANGAN
189	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 MANAJEMEN	1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP | SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP
190	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 MANAJEMEN	1		1	SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
191	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
192	PERENCANA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
193	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 HUKUM	1		1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH | SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
194	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 ILMU POLITIK	1		1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATPOL PP
195	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1		1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH | SEKSI PENINDAKAN
196	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK / D-III MANAJEMEN / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1		1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN
197	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 ILMU KOMUNIKASI	1		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
198	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 JURNALISTIK / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
199	PRANATA KEWILAYAHAN	PELAKSANA	S-1 TEKNIK GEOLOGI	1		1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAPAN | SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN
200	PRANATA KEWILAYAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1		1	KECAMATAN PANGKAH | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
201	PRANATA KEWILAYAHAN	PELAKSANA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM	1		1	KECAMATAN BUMIJAWA | SEKSI PEMERINTAHAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
202	PRANATA KEWILAYAHAN	PELAKSANA	S-1 STATISTIKA / S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH
203	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI		1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG DATA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
204	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1		1	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN UMUM
205	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1		1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA | SEKSI KEPENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
206	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV TEKNIK INFORMATIKA		1	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
207	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 ILMU INFORMATIKA	1		1	RSUD SURADADI | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
208	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
209	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNIK INFORMATIKA	1		1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR | SEKSI KEPENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
210	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / D-IV TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA GRAFIS	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
211	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI
212	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS		1	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG PEMBINAAN, PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR
213	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
214	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN SURADADI | SEKRETARIAT KECAMATAN SURADADI | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
215	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN BUMIJAWA | SEKRETARIAT KECAMATAN BUMIJAWA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
216	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | UPTD UNIT PENILAIAN KOMPETENSI ASN
217	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN SLAWI | SEKRETARIAT KECAMATAN SLAWI | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
218	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN JATINEGARA | SEKRETARIAT KECAMATAN JATINEGARA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
219	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | BIDANG ANGGARAN | SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR DAN UNSUR PILIHAN
220	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III SISTEM INFORMASI / D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
221	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN DUKUHWARU | SEKRETARIAT KECAMATAN DUKUHWARU | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
222	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA
223	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | BIDANG PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA DESA
224	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS PERIKANAN | SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN | SUB BAGIAN KEUANGAN
225	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN MARGASARI | SEKRETARIAT KECAMATAN MARGASARI | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
226	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	RSUD SURADADI | BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
227	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	RSUD DR. SOESELO | WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN UMUM
228	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | BIDANG PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD
229	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN BOJONG | SEKRETARIAT KECAMATAN BOJONG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
230	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENYULUHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH
231	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
232	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
233	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN PAGERBARANG | SEKRETARIAT KECAMATAN PAGERBARANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
234	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
235	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN BALAPULANG | SEKRETARIAT KECAMATAN BALAPULANG | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
236	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM | SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN STAF AHLI BUPATI DAN KEPEGAWAIAN
237	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS KESEHATAN | BIDANG FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
238	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN LEBAKSIU | SEKRETARIAT KECAMATAN LEBAKSIU | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
239	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	BADAN PENDAPATAN DAERAH | BIDANG PENYULUHAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH | SUB BIDANG EVALUASI DAN PEMERIKSAAN PENDAPATAN DAERAH
240	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN DUKUHTURI | SEKRETARIAT KECAMATAN DUKUHTURI | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
241	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN PEMERINTAHAN

NO	JABATAN	JENIS JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI		JUMLAH FORMASI	UNIT PENEMPATAN
				UMUM	KHUSUS DISABILITAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
242	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	KECAMATAN PANGKAH | SEKRETARIAT KECAMATAN PANGKAH | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
243	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III REKAYASA PERANGKAT LUNAK APLIKASI / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI / D-III TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS	1		1	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
244	PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	FUNGSIONAL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1		1	SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN ORGANISASI
245	STATISTISI AHLI PERTAMA	FUNGSIONAL	S-1 STATISTIKA	1		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | BIDANG DATA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
246	TEKNISI MESIN ALAT BERAT	PELAKSANA	D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK MESIN INDUSTRI	2		2	DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA | UPTD LABORATORIUM PERINDUSTRIAN | SUB BAGIAN TU UPTD LABORATORIUM PERINDUSTRIAN
247	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	PELAKSANA	S-1 TEKNIK KIMIA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1		1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP | UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN | SUB BAGIAN TATAUSAHA
JUMLAH				274	6	280	

SEKRETARIS DAERAH
Selaku Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN
Pemerintah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2024

AMIR MAKHMUD, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730114199803100 3

Lampiran II:
Pengumuman Pengadaan CPNS Pemerintah Kab. Tegal TA 2024

CONTOH
SURAT LAMARAN CPNS PEMKAB TEGAL
TAHUN 2024

....., ... 2024

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Lamaran sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024

Kepada Yth.

BUPATI TEGAL
di _
S L A W I

Memperhatikan pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Kabupaten Tegal nomor ..... tanggal ..... tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Pendidikan :
No HP/Telepon :
Alamat e-mail :

mengajukan lamaran untuk menjadi CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 dengan formasi, jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

Jenis Formasi *) :
Jabatan **) :
Kualifikasi pendidikan ***) :
Unit Penempatan ****) :

Sebagai bahan pertimbangan, kami unggah dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2024, melalui SSCASN, yang terdiri:

1. *File scan* surat lamaran asli.
2. *File scan* e-KTP asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan.
3. *File scan* ijazah pendidikan asli atau pengganti ijazah asli.
4. .....*****)

Demikian surat lamaran ini kami sampaikan. Atas perhatian Ibu, kami menyampaikan terima kasih.

Hormat kami,

E meterai Rp 10.000

******)

Nama lengkap

Keterangan :

*) Pilih salah satu jenis formasi: khusus atau umum. Jika memilih formasi khusus, sebutkan jenis formasi khususnya. Contoh: Formasi Umum.
**) Tulis nama jabatan yang dilamar. Contoh: Perekayasa Ahli Pertama.
***) Tulis kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Contoh: S-2 Manajemen Rekayasa.
****) Tulis unit penempatan formasi yang dilamar. Contoh: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan | Bidang Penelitian Dan Pengembangan.
*****) Tulis syarat-syarat lain sesuai dengan formasi dan jabatan yang dilamar. Lihat romawi V pengumuman pengadaan CPNS Pemkab Tegal tahun anggaran 2024.
******) Ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai nominal Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

Lampiran III:
Pengumuman Pengadaan CPNS Pemerintah Kab. Tegal TA 2024

CONTOH
SURAT PERNYATAAN BERMETERAI Rp. 10.000

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Pendidikan	:	
Alamat	:	
Formasi yang dilamar	:	
Jabatan yang dilamar	:	
Kualifikasi pendidikan	:	

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
6. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
7. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.
8. Bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Tegal dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi PNS.
9. Bersedia dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak akan mengajukan keberatan/aduan apabila data yang disampaikan dalam seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024 terbukti tidak benar dan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Nama kota, tgl, bulan, tahun.

E Meterai
Rp. 10.000

Ttd

*)

Nama Lengkap

Keterangan :

*) Ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai nominal Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah).

Lampiran IV:
Pengumuman Pengadaan CPNS Pemerintah Kab. Tegal TA 2024

CONTOH
SURAT PERNYATAAN DISABILITAS

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Pendidikan	:	
Alamat	:	
Formasi yang dilamar	:	
Jabatan yang dilamar	:	
Kualifikasi pendidikan	:	

Dengan ini menyatakan bahwa saya merupakan penyandang disabilitas dengan jenis disabilitas ……*) dan derajat disablititas ……..*).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pada kemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2024.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

Nama kota, tgl, bulan, tahun.

E Meterai
Rp. 10.000

Ttd

**)

Nama Lengkap

Keterangan :

*) Diisi sesuai dengan surat keterangan dokter.

**) Ditandatangani dengan pena bertinta hitam dan dibubuhi e-meterai nominal Rp 10.000,00,- (sepuluh ribu rupiah)..